



**EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL DALAM
MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA
MIKRO KECIL MENENGAH
(Studi Kasus Bank UMKM Cabang Jember)**

SKRIPSI

oleh
Maya Cintya
NIM. 100810301137

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2015**

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan skripsiku ini sebagai bentuk tanggung jawab, bakti, dan ungkapan terima kasihku kepada :

1. Orangtuaku tercinta, Supardi, S.H. dan Ertina Pancawati, terima kasih atas kasih sayang, doa yang tidak pernah terputus, pengertian dan dukungan setiap langkah keberhasilanku serta segalanya yang telah diberikan;
2. Kakak dan adikku tersayang, Adjitora Pradata dan Ayoumi Putri Dewanty, terima kasih telah menjadi motivasi dan semangat untuk masa depanku;
3. Guru-guruku dari TK hingga SMA dan Para Dosen, yang telah memberikan ilmunya dan membimbingku dengan penuh rasa sabar;
4. Almamater tercinta Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

MOTTO

“PROCESS – PROGRESS – SUCCESS”

(Maya)

“Aku memang berjalan pelan-pelan tapi aku tidak pernah berjalan mundur”

(Abraham Lincoln)

“Bermimpilah tentang apa yang ingin kamu impikan, pergilah ke tempat-tempat kamu ingin pergi. Jadilah seperti yang kamu inginkan, karena kamu hanya memiliki satu kehidupan dan satu kesempatan untuk melakukan hal-hal yang ingin kamu lakukan”

(Anonim)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maya Cintya

NIM : 100810301137

Jurusan : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: “Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Oktober 2015

Yang menyatakan,

Maya Cintya

NIM 100810301137

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam
Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha
Mikro Kecil Menengah
Nama Mahasiswa : Maya Cintya
Nomor Induk Mahasiswa : 100810301137
Jurusan : Akuntansi / S-1

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak.
NIP. 19660805 19920 2 001

Septarina Prita DS, S.E., Ak.
NIP. 19820912 200604 2 002

Ketua Program
Studi S1 Akuntansi

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak.
NIP. 19710727 199512 1 001

SKRIPSI

EVALUASI PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERNAL DALA MENUNJANG EFEKTIVITAS SISTEM PEMBERIAN KREDIT USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (Studi Kasus Bank UMKM Cabang Jember)

Oleh
MAYA CINTYA
100810301137

Pembimbing:

Dosen Pembimbing I : Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si., Ak.
Dosen Pembimbing II : Septarina Prita DS, S.E., Ak

Maya Cintya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengendalian internal terhadap sistem pemberian kredit, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas penerapan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit pada BankUMKM cabang Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan objek dari penelitian yang digunakan adalah prosedur pemberian kredit umkm. Penelitian ini mengevaluasi penerapan pengendalian internal sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO serta kelemahan yang terdapat pada pengendalian internal BankUMKM cabang Jember. Kesimpulannya adalah pengendalian internal atas aktivitas pemberian kredit yang ada pada Bank UMKM cabang Jember memiliki beberapa kelemahan, namun secara keseluruhan pengendalian sudah berjalan dengan efektif.

Kata Kunci: Pengendalian Internal, Pemberian Kredit

Maya Cintya

Accountance, Faculty of Economy, Jember University

ABSTRACT

The purpose of this research is to know the application of internal controlling on giving credit system, identifying the excesses and the weaknesses which are entangled with of application internal controlling system in giving credit system in UMKM Bank Jember office. The research method which used is UMKM giving credit procedure. This research evaluating the internal application appropriate with internal controlling component based on COSO along with the weaknesses which exist in internal controlling UMKM Bank Jember office. The conclusion is internal controlling of giving credit activity in UMKM Bank Jember office has several weaknesses, yet overall, the controlling has been worked properly.

Keywords: Internal controlling, giving credit

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah”** yang telah disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. M. Fathorrazi, SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
2. Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember dan Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember
3. Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak. dan Separina Prita DS, S.E., Ak. selaku dosen pembimbing yang dengan ketulusan hati dan kesabaran memberikan bimbingan dan masukan dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Kedua Orang tuaku tercinta Supardi, S.H. dan Ertina Pancawati yang dengan sabar dan ketulusan hatinya mencurahkan cinta, kasih sayangnya dan dukungan berupa materi maupun semangat dan doa dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kakak dan adikku tersayang Adjitora Pradata dan Ayoumi Putri Dewanty yang telah memberikan dukungan semangat dan doa.
6. Adik angkat dan iparku, Fiqhi Arlengga dan Defita yang selalu memotivasi dan menyemangatiku.
7. Keluarga besar Sugeng Purwanto yang telah berbaik hati berbagi kebahagiaan dan memberikan doa.

8. Sahabat sekaligus keluarga keduku, Ghea, One, Vay, Aan, Lala dan juga para pejuang KURUSETRA terima kasih untuk motivasi, doa dan pelajaran berharga di setiap harinya.
9. AY, Ronggeng, Jeni, Hesti, Nafas, para Alakoh dan Minion's Wadon Belog, terima kasih sudah menjadi partner hebat dalam menyalurkan hobiku serta semua kenangannya.
10. Teman-teman Akuntansi 2009, 2010, 2011 terima kasih atas kerjasama dan bantuannya selama ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses.
11. Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih banyak atas semua bantuan yang diberikan.

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan masukan dan saran atas penelitian ini, sehingga dapat menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan para pembaca.

Jember, 11 Oktober 2015

Maya Cintya

RINGKASAN

Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Sistem Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus pada Bank UMKM Cabang Jember); Maya Cintya, 100810301137; 2015; 106 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

pesatnya daya saing perusahaan, tidak menutup kemungkinan pula adanya kendala bagi pelaku usaha baik yang berskala besar maupun yang kecil. Kebanyakan masalah yang dihadapi para pelaku usaha adalah permodalan dalam pengembangan usahanya, terlebih pada pelaku usaha dengan pendapatan rendah. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberi pinjaman modal dengan sistem kredit. Kredit merupakan salah satu wadah yang dianggap sangat bisa membantu untuk pengembangan usaha maupun motivasi membangun usaha, bagi perusahaan berskala besar terlebih perusahaan berskala kecil khususnya. Fasilitas keuangan ini memungkinkan seseorang atau badan usaha dalam meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan kata lain sebenarnya kredit dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas ekonomi. Terlebih sangat membantu pelaku usaha khususnya yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan usahanya. Semakin banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di suatu daerah memang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan dapat berperan sebagai proses pemerataan maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Namun kemungkinan terburuknya kendala yang dihadapi juga mengalami peningkatan karena latar belakang yang sama. Bagi pelaku usaha dengan penghasilan yang rendah, sangat sulit untuk mengembangkan usaha yang sudah ditekuni dan bahkan sudah menjadi pendapatan sendiri. Dalam pemberian kredit, perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu

untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Rentang waktu pengembalian pinjaman tersebut menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh debitur terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari kreditur, atau yang biasa disebut kredit macet. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Saat ini telah banyak penawaran untuk peminjaman modal, seperti program Kredit Usaha Rakyat, yang telah diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi. Bank UMKM ini dulunya lebih dikenal sebagai Bank BPR. Bank pelaksana yang memberi wadah langsung bagi pelaku usaha yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi UMKM untuk penyaluran kredit. Salah satu pemberian bantuan modal secara kredit kepada kelompok pelaku usaha mikro yang mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jember dan mendapat pinjaman kredit dari Bank UMKM diharapkan mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui usaha pemberian kredit yang telah diberikan, harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu dan Nyoman (2013), dengan hasil kesimpulan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR. Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu: jaminan hilang, *bad character*, bercerai, bangkrut, salah analisa kredit. Upaya yang telah dilakukan yaitu: tagih terus, *addendum*, *restructure*, *recondition*, *rescedulle*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal terhadap pemberian kredit, mengidentifikasi kelebihan dan kelemahan yang berkaitan dengan pengendalian internal yang diterapkan, dan memberikan rekomendasi atas penerapan pengendalian internal dalam system pemberian kredit Bank UMKM cabang Jember. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan objek dari penelitian yang digunakan adalah prosedur pengendalian internal sesuai dengan komponen pengendalian internal menurut COSO serta kelemahan yang terdapat pada pengendalian internal Bank UMKM cabang Jember.

Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya beberapa kelemahan dalam implementasi pengendalian intern. Diantaranya adalah adanya rangkap tugas, tidak adanya seragam perusahaan, dan laporan keuangan kantor cabang tidak di publikasikan. Namun keseluruhan implementasi pengendalian internal pada Bank UMKM cabang Jember sudah cukup baik dan efektif.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN	
JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
ABSTRACT.....	viii
ABSTRAK.....	ix
PRAKATA.....	x
RINGKASAN.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TA.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masala.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Landasan Teori.....	7
2.1.1 Pengendalian Internal.....	7
2.1.2 Kredit.....	18
2.1.3 Pengendalian Internal Kredit.....	23

2.1.4 Kriteria UMKM	25
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
BAB 3. METODE PENELITIAN.....	30
3.1 Lokasi Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian	30
3.3 Data dan Sumber Data	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data	31
3.5 Metode Keabsahan Data	33
3.6 Teknik Analisis Data	34
3.7 Kerangka Pemecahan Masalah	35
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	36
4.2 Produk Bank UMKM	46
4.2.1 Barang dan Jasa	46
4.2.2 Kredit	49
4.3 Prosedur Pemberian Kredit	52
4.3.1 Prosedur Pemberian Kredit Bank UMKM	52
4.3.2 Dokumen dan Administrasi Kredit	54
4.3.3 Bagan Alur Prosedur Pemberian Kredit	57
4.4 Evaluasi Pengendalian Intern Bank UMKM	59
4.5 Evaluasi Pengendalian Internal	82
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	96
5.1 Kesimpulan.....	96
5.2 Keterbatasan Penelitian	97
5.3 Saran.....	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Tinjauan Hasil Penelitian.....	28
4.1 Evaluasi Pengendalian Internal Bank UMKM berdasarkan Lingkungan Pengendalian	68
4.2 Evaluasi Pengendalian Internal Bank UMKM berdasarkan Penilaian Resiko	73
4.3 Evaluasi Pengendalian Internal Bank UMKM berdasarkan Informasi dan Komunikasi	75
4.4 Evaluasi Pengendalian Internal Bank UMKM berdasarkan Aktivitas Pengendalian	78
4.5 Evaluasi Pengendalian Internal Bank UMKM berdasarkan Pemantauan	81
4.6 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit berdasarkan Lingkungan Pengendalian.....	85
4.2 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit berdasarkan Penilaian Resiko	90
4.3 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit Pemberian Kredit berdasarkan Informasi dan Komunikasi	91
4.4 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit berdasarkan Aktivitas Pengendalian	93
4.5 Evaluasi Pengendalian Internal Pemberian Kredit berdasarkan Pemantauan	95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Kerangka Pemecahan Masalah	35
4.1 Struktur Organisasi Bank UMKM Cabang Jember	41
4.2 Bagan Alur Prosedur Pemberian Kredit	58

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring banyaknya pertumbuhan dan perkembangan dari berbagai jenis usaha, dapat memberi dampak perekonomian yang baik bagi suatu daerah. Pemanfaatan kreativitas maupun sumber daya daerah selain dapat meningkatkan pendapatan perekonomian daerah tersebut, juga dapat meningkatkan pemasukan bagi pelaku usaha. Namun pesatnya daya saing perusahaan, tidak menutup kemungkinan pula adanya kendala bagi pelaku usaha baik yang berskala besar maupun yang kecil. Kebanyakan masalah yang dihadapi para pelaku usaha adalah permodalan dalam pengembangan usahanya, terlebih pada pelaku usaha dengan pendapatan rendah. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memberi pinjaman modal dengan sistem kredit. Kredit merupakan salah satu wadah yang dianggap sangat bisa membantu untuk pengembangan usaha maupun motivasi membangun usaha, bagi perusahaan berskala besar terlebih perusahaan berskala kecil khususnya. Menurut Kasmir (2011:102), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.” Fasilitas keuangan ini memungkinkan seseorang atau badan usaha dalam meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan, dengan kata lain sebenarnya kredit dapat membantu kita dalam melakukan aktivitas ekonomi.

Adanya fasilitas kredit dirasa sangat membantu pelaku usaha khususnya yang bergerak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan usahanya. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha kecil

maupun menengah yang dilakukan oleh sekelompok orang dan penghasilannya pun terbilang rendah. Padahal kita ketahui bahwa UMKM ini cukup berpotensi dalam peningkatan perekonomian daerah tersebut. Kebanyakan UMKM ini dikembangkan oleh kelompok keluarga miskin. Kondisi ini yang mengharuskan baik pengusaha yang menjalankan usaha kecil maupun menengah agar mengupayakan kestabilan atau peningkatan eksistensi usahanya. Semakin banyaknya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di suatu daerah memang dapat memperluas lapangan pekerjaan dan dapat berperan sebagai proses pemerataan maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam pengembangan UMKM meskipun terbilang sangat banyak dan meningkat dari tahun ke tahun, kemungkinan terburuknya kendala yang dihadapi juga mengalami peningkatan karena latar belakang yang sama. Bagi pelaku usaha dengan penghasilan yang rendah, sangat sulit untuk mengembangkan usaha yang sudah ditekuni dan bahkan sudah menjadi pendapatan sendiri.

Pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan pinjaman modal maupun sebagai pengembangan usahanya, akan mengajukan permohonan pemberian kredit kepada instansi terkait. Dalam pemberian kredit, perlu memberikan penilaian terhadap nasabah yang mengajukan kredit pinjaman serta merasa yakin bahwa nasabahnya tersebut mampu untuk mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Masalah keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus diperhatikan, karena adanya risiko yang timbul dalam sistem pemberian kredit. Kebanyakan permasalahan yang terjadi dari pihak debitur, kredit yang telah diberikan dalam jangka waktu tertentu susah kembali. Rentang waktu pengembalian pinjaman tersebut menimbulkan resiko yang sangat besar yang mungkin ditanggung oleh debitur terhadap ketidakpastian pengembalian pinjaman dari kreditur, atau yang biasa disebut kredit macet.

Permasalahan kredit macet sebenarnya bisa dihindari dengan adanya suatu pengendalian intern yang memadai dalam bidang pemberian perkreditan. Dengan kata lain diperlukan suatu pengendalian intern yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit. Dengan terselenggaranya pengendalian intern yang memadai dalam bidang pemberian perkreditan, berarti menunjukkan sikap kehati-hatian yang telah

dilakukan oleh perusahaan ataupun instansi terkait. Menurut Mulyadi (2010:164) pengendalian intern merupakan suatu struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian internal yang dilakukan dalam menunjang sistem pemberian kredit untuk meminimalisir adanya kredit macet ataupun kendala lainnya dalam pemberian kredit, salah satunya dengan penerapan konsep COSO. Pada konsep COSO tersebut, pengendalian internal yang di nilai melalui lingkungan kerja, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta monitoring. Adanya proses pengendalian dari beberapa unsur tersebut, diharapkan mampu membantu perusahaan sebagai tahap awal untuk menunjang efektivitas sistem pemberian kredit.

Dari data Dinas Koperasi dan UMKM Jember tahun 2013, jumlah UMKM se-Kabupaten Jember yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UMKM Jember sebanyak 2.375 unit. Banyaknya ide kreatif dalam pembangunan dan pengembangan usaha menjadikan Jember sebagai potensi dalam meningkatkan perekonomian Jember sendiri. Dari jumlah tersebut menurut survey BPS Kabupaten Jember merupakan penyumbang terbesar se-Jawa Timur di bidang perdagangan, dengan persentase 6,2% dari total UMKM di Jawa Timur (BPS, 2013). Selain itu pula pada tahun sebelumnya, Jember merupakan salah satu KUMKM Jawa Timur yang mendapatkan penghargaan penggerak KUMKM dari Kementerian Koperasi dan UMKM Pusat.

Saat ini telah banyak penawaran untuk peminjaman modal, seperti program Kredit Usaha Rakyat, yang telah diterapkan oleh beberapa lembaga keuangan seperti bank ataupun koperasi. Bahkan sekarang juga terdapat instansi swasta yang bergerak dalam pengembangan UMKM. Sebagai bentuk pengendalian pemerintah sendiri, peran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan UMKM termasuk didalamnya membantu pelaku usaha yang memiliki kendala kurangnya modal dengan memberi rekomendasi pengajuan kredit kepada Bank Pelaksana, salah satunya adalah Bank UMKM Jawa Timur.

Bank UMKM merupakan salah satu bank yang berfokus pada pendanaan UMKM. Bank UMKM ini dulunya lebih dikenal sebagai Bank BPR. Bank pelaksana yang memberi wadah langsung bagi pelaku usaha yang telah mendapat rekomendasi dari Dinas Koperasi UMKM untuk penyaluran kredit. Secara prosedur, para pelaku usaha yang membutuhkan pinjaman modal sebagai pengembangan usahanya, mereka mengajukan proposal kepada Dinas yang nantinya akan ditindak lanjuti oleh bank pelaksana. Bank UMKM ini bertugas untuk meninjau kembali kelayakan pengajuan pinjaman modal pada UMKM yang bersangkutan, dan membantu pemberian kredit apabila memenuhi persyaratan.

Salah satu pemberian bantuan modal secara kredit kepada kelompok pelaku usaha mikro yang mendapat pembinaan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Jember dan mendapat pinjaman kredit dari Bank UMKM diharapkan mampu berperan sebagai badan usaha yang tangguh dan mandiri. Melalui usaha pemberian kredit yang telah diberikan, harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi risiko kegagalan kredit.

Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ayu dan Nyoman (2013), dengan hasil kesimpulan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR. Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu: jaminan hilang, *bad character*, bercerai, bangkrut, salah analisa kredit. Upaya yang telah dilakukan yaitu: tagih terus, *addendum*, *restructure*, *recondition*, *rescedulle*.

Dari permasalahan yang telah teruraikan, garis besarnya adalah sistem pemberian kredit yang diberikan untuk mengembangkan potensi UMKM harus diimbangi pula dengan fungsi pengendalian intern untuk mencegah adanya kredit macet, dan permasalahan kredit macet tersebut tidak menutup kemungkinan dialami oleh instansi pemerintah yang memang berperan besar dalam pengembangan UMKM sebagai bank pelaksana pemberi kredit yaitu Bank UMKM. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul “Evaluasi Pelaksanaan Pengendalian Internal dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit Usaha Kecil Menengah”. Penelitian ini dilakukan pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jember.

Perbedaan dari penelitian sebelumnya terletak pada komponen pengendalian internal yang dilakukan guna menunjang efektivitas pemberian kredit. Pada penelitian ini pengendalian internal yang digunakan acuan untuk mengevaluasi objek adalah komponen COSO. Objek penelitian tertuju langsung pada Bank Pelaksana yang telah direkomendasikan dari Dinas Koperasi dan UMKM Jember sebagai pemberi kredit yang sebagai wujud pengendalian perkembangan UMKM dari pemerintah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit pada UMKM?
2. Apakah pelaksanaan pengendalian internal yang diterapkan Bank UMKM telah berjalan efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengendalian internal dalam menunjang efektivitas sistem pemberian kredit pada UMKM
2. Untuk mengetahui seberapa efektif pelaksanaan pengendalian internal yang telah dilakukan Bank UMKM

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jember

Dapat dijadikan evaluasi bagi instansi dan karyawan dalam pelaksanaan pengendalian internal yang dapat menunjang efektivitas sistem pemberian kredit UMKM pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jember.

b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Jember

Dapat dijadikan referensi bagi instansi, untuk membantu pengaplikasian dalam merekomendasikan pemberian kredit usaha mikro kecil dan menengah yang terdaftar pada Dinas Koperasi dan UMKM Jember

c. Bagi UMKM

Dapat dijadikan wawasan mengenai sistem pemberian kredit bagi UMKM dan memberikan pengetahuan pengendalian internal dalam sistem pemberian kredit UMKM dari Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jember.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan literatur, referensi atau acuan untuk menindak lanjuti penelitian-penelitian serupa serta menjadi bahan kajian yang lebih mendalam bagi para peneliti yang berminat pada kajian dan permasalahan yang sama.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengendalian Internal

A. Pengertian Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2010:164) pengendalian intern merupakan suatu struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Gondodiyoto (2010:250) pengendalian internal dapat dibedakan dalam berbagai segi pandang.

- a. *Preventif controls*, yaitu pengendalian intern yang dirancang dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan dan penyalahgunaan. Contoh jenis pengendalian ini adalah desain formulir yang baik, item-nya lengkap, mudah diisi, serta *user training* atau pelatihan kepada orang-orang yang berkaitan dengan input sistem, sehingga mereka tidak melakukan kesalahan. Menurut Romney & Steinbart (2003: 195), Pengendalian untuk pencegahan (*preventive control*) mencegah timbulnya suatu masalah sebelum mereka muncul. Memperkerjakan personel akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai, dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas dan informasi, merupakan pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah. Pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dikerjakan dengan maksud supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Untuk menghindari tindakan penyimpangan dapat digunakan dengan beberapa cara antara lain :

- 1.) Mengadakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tata cara suatu kegiatan atau dibuat tata tertib
 - 2.) Membuat pedoman-pedoman kerja
 - 3.) Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pembuat kesalahan
 - 4.) Menetapkan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawab
 - 5.) Mengorganisasikan segala macam kegiatan
 - 6.) Menentukan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan
- b. *Detection control*, adalah pengendalian yang didesain dengan tujuan agar apabila direkam/ dikonversi dari media sumber untuk ditransfer ke sistem computer dapat dideteksi bila terjadi kesalahan (maksudnya tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan). Contoh jenis pengendalian ini adaah misalnya jika seseorang mengambil uang di ATM, maka seharusnya program computer mendeteksi jika dana tidak cukup, atau saldo minimum tidak mencukupi, atau melebihi jumlah maksimal yang diinginkan untuk pengambilan tiap harinya. Menurut Romney & Steinbart (2003:195), Pengendalian untuk pemeriksaan (*detective control*) dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul.
- c. *Corrective controls*, ialah pengendalian yang sifatnya jika terdapat data yang sebenarnya error tetapi tidak terdeteksi oleh detection control, atau data yang error yang terdeteksi oleh program validasi, harus ada prosedur yang jelas tentang bagaimana melakukan pembetulan terhadap data yang salah dengan maksud untuk mengurangi kemungkinan kerugian kalau kesalahan/ penyalahgunaan tersebut sudah benar-benar terjadi. Menurut Romney & Steinbart (2003:195), Pengendalian korektif (*corrective control*) memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian untuk pemeriksaan. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditimbulkan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasi atau dihilangkan.

B. Prinsip Dasar Pengendalian Intern

Ada beberapa asumsi dasar yang perlu dipahami mengenai pengendalian intern bagi suatu organisasi atau perusahaan, Gondodiyoto (2010:256).

- a. Pengendalian intern merupakan manajemen responsibility. Bahwa sesungguhnya yang paling berkepentingan terhadap sistem pengendalian intern suatu entitas organisasi/perusahaan adalah manajemen (lebih tegasnya lagi adalah *top management/* direksi), karena dengan sistem pengendalian intern yang baik itulah *top management* dapat diharapkan kebijakannya dipatuhi, aktiva atau harta perusahaan dilindungi, dan penyelenggaraan pencatatan dengan baik.
- b. *Top management* bertanggung jawab menyusun sistem pengendalian intern, tentu saja dilaksanakan oleh para stafnya. Dalam penyusunan tim yang akan ditugaskan untuk merancang sistem pengendalian intern, harus dipilih anggotanya dari para ahli/komponen, termasuk yang berkaitan dengan teknologi informasi.
- c. Pengendalian intern seharusnya bersifat *generic*, mendasar, dan dapat diterapkan pada tiap perusahaan pada umumnya (tidak boleh jika hanya berlaku untuk suatu perusahaan tertentu saja, melainkan harus ada hal-hal yang bersifat dasar yang berlaku)
- d. Sifat pengendalian intern adalah *reasonable assurance*, artinya tingkat rancangan yang kita desain adalah yang paling optimal. Sistem pengendalian yang paling baik ialah menentukan yang paling maksimal, apalagi harus dipertimbangkan keseimbangan *cost benefit*-nya
- e. Pengendalian intern mempunyai keterbatasan-keterbatasan, misalnya adalah sebaik-baiknya *control* tetapi kalau para pegawai yang melaksanakannya tidak cakap atau kolusi, maka tujuan pengendalian ini mungkin tidak tercapai.
- f. Pengendalian intern harus selalu dan terus-menerus dievaluasi, diperbaiki, disesuaikan dengan perkembangan kondisi dan teknologi.

C. Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pertama dirancangnya pengendalian intern dari segi pandang manajemen menurut Gondodiyoto (2010:257) ialah untuk dapat diperolehnya data yang dapat dipercaya, yaitu jika data lengkap, akurat, unik, rasional, dan kesalahan-kesalahan data terdeteksi. Tujuan berikutnya adalah dipatuhinya kebijakan akuntansi yang akan dicapai jika data diolah tepat waktu, penilaian, klasifikasi dan pisah batas waktu terjadi transaksi akuntansi tepat. Tujuan selanjutnya adalah pengamanan asset yaitu dengan adanya otoritas, distribusi output, data valid dan diolah serta disimpan secara aman.

Tujuan dirancangnya sistem pengendalian intern dari kaca pandang terkini dan yang sudah mencakup lingkup yang lebih luas pada hakikatnya adalah untuk melindungi harta milik perusahaan, mendorong kecermatan dan kehandalan data dan pelaporan akuntansi, meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan dan aturan-aturan yang ada.

Mulyadi (2008:181) menjelaskan menurut tujuannya, pengendalian intern dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Pengendalian intern akuntansi (*internal accounting control*)
Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
- b. Pengendalian intern administratif (*internal administrative control*)
Meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan pengendalian intern menurut Mulyadi (2008:181) adalah:

- a. Menjaga kekayaan organisasi
 - 1) Penggunaan kekayaan organisasi hanya melalui sistem otorisasi yang telah diterapkan.

- 2) Pertanggungjawaban kekayaan organisasi yang dicatat dibandingkan dengan kekayaan yang sesungguhnya ada.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan akuntansi
 - 1) Pelaksanaan transaksi melalui sistem otorisasi yang telah ditetapkan.
 - 2) Pencatatan transaksi yang telah terjadi dalam catatan akuntansi
 - c. Mendorong efisiensi
 - d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen

Arens *et.al* (2014:308) menyatakan bahwa manajemen memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern yang efektif, yaitu:

- a. Reabilitas pelaporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab untuk menyiapkan laporan bagi para investor, kreditor dan pemakai lainnya. Manajemen memikul baik tanggungjawab hukum maupun profesional untuk memastikan bahwa informasi telah disajikan secara wajar sesuai dengan persyaratan pelaporan seperti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Tujuan pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan adalah memenuhi tanggungjawab pelaporan keuangan tersebut.

- b. Efisiensi dan efektivitas operasi

Pengendalian perusahaan akan mendorong pemakaian sumber daya secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran perusahaan. Tujuan yang penting dari pengendalian intern adalah memperoleh informasi keuangan dan non-keuangan yang akurat tentang operasi perusahaan untuk keperluan pengambilan keputusan.

D. Unsur Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2008:164) unsur pokok pengendalian intern adalah:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (*framework*) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan, seperti pemisahan setiap fungsi untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan, dan biaya. Dalam setiap organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Prosedur pencatatan yang baik akan menjamin data yang direkam tercatat ke dalam catatan akuntansi dengan tingkat ketelitian dan keandalan (*reliability*) yang tinggi. Dengan demikian sistem otorisasi akan menjamin masukan yang dapat dipercaya bagi proses akuntansi.
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dan sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya. Adapun cara-cara yang umumnya ditempuh oleh perusahaan dalam menciptakan praktik yang sehat adalah:
 - 1) Penggunaan formulir bernomor urut tercetak yang pemakaiannya harus dipertanggungjawabkan oleh yang berwenang.
 - 2) Pemeriksaan mendadak (*surprised audit*), dilaksanakan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang akan diperiksa, dengan jadwal yang tidak teratur.

3) Setiap transaksi tidak boleh dilaksanakan dari awal sampai akhir oleh satu orang atau satu unit organisasi, tanpa ada campur tangan dari yang lain, agar tercipta internal *check* yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.

4) Perputaran jabatan (*job rotating*).

Perputaran jabatan yang diadakan secara rutin akan dapat menjaga independensi pejabat, memperluas wawasan pengetahuan yang mendalam, sehingga persekongkolan di antara karyawan dapat dihindari.

d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menurut COSO (*Commite of Sponsoring Organization*) yang merupakan *framework* yang dibuat oleh sektor swasta dengan gabungan dari 5 professional association yaitu: [AICPA](#) (*The American Institute of Certified Public Accountants*), [AAA](#) (*The American Accounting Association*), [FEI](#) (*Financial Executives International*), [IIA](#) (*The Institute of Internal Auditors*), [IMA](#) (*The Institute of Management Accountants*), Pengendalian internal (*internal control*) terdiri atas 5 komponen, yaitu:

a. Lingkungan pengendalian

Inti dari setiap perusahaan adalah faktor manusia-yang meliputi integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi; filosofi dan gaya manajemen; cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya; pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia dan perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi.

Menurut Singleton (2007:26), lingkungan pengendalian memiliki beberapa elemen penting diantaranya yaitu:

1) Falsafah dan gaya manajemen operasi

Falsafah adalah seperangkat parameter bagi karyawan dan

perusahaan. Falsafah merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan perusahaan. Gaya operasi mencerminkan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu perusahaan harus dilakukan.

2) Struktur organisasi

Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab yang terdapat dalam perusahaan. Struktur organisasi formal biasanya digambarkan dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi ini garis arus komunikasi dalam organisasi. Menurut Bodnar dan William (2003:174), “Struktur organisasi didefinisikan sebagai pola otoritas dan tanggung jawab yang terdapat dalam perusahaan. Struktur organisasi formal biasanya digambarkan dalam suatu bagan organisasi. Bagan organisasi ini menunjukkan arus komunikasi dalam organisasi.”

3) Komite audit

Anggota komite audit dibebani tanggung jawab mengenai laporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang. Menurut Bodnar dan William (2003:174), “Dewan komisaris yang efektif adalah yang independen dari manajemen dan anggota-anggotanya aktif menilai aktivitas manajemen. Komite audit biasanya dibebani tanggung jawab mengenai laporan keuangan, mencakup struktur pengendalian intern, dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang. Komite audit harus memelihara komunikasi langsung yang terus menerus, baik antara dewan komisaris dengan auditor internal maupun eksternal, agar pengendalian intern menjadi lebih efektif.

4) Penetapan wewenang dan tanggung jawab

Mencakup cara-cara seperti memo dari manajemen tentang pentingnya pengendalian dan masalah yang berkaitan dengan pengendalian, organisasi formal dan rencana operasi, deskripsi tugas

pegawai dan kebijakan terkait, dan dokumen kebijakan yang menggambarkan perilaku pegawai seperti perbedaan kepentingan dan kode etik perilaku formal.

5) Metode pengawasan manajemen

Metode pengawasan manajemen merupakan metode yang digunakan manajemen untuk memantau aktifitas setiap fungsi dan anggota organisasi. Menurut Bodnar dan William (2003:178), “Metode-metode pengendalian intern terdiri dari teknik-teknik yang digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan intruksi dan tujuan-tujuan operasi kepada bawahan dan untuk mengevaluasi hasil-hasilnya”

6) Fungsi audit intern

Fungsi audit intern dibuat dalam satuan usaha untuk memantau efektifitas kebijakan dan prosedur lain yang berkaitan dengan pengendalian. Untuk meningkatkan keefektivitas fungsi audit intern, adanya staf audit intern yang independen dari bagian operasi dan akuntansi menjadi penting dan melapor kepada tingkat manajemen yang lebih tinggi dalam organisasi, baik manajemen puncak atau komite audit dari dewan direksi dan komisaris.

7) Praktek dan kebijakan karyawan

Tujuan organisasi dapat dicapai melalui serangkaian tindakan manusia dalam organisasi, maka anggota organisasi merupakan elemen yang paling penting dalam struktur pengawasan intern. Tujuan pengendalian intern harus dipandang relevan dengan individu yang menjalankan pengendalian tersebut. Oleh karena itu, suatu organisasi perlu memiliki karyawan yang jujur dan kompeten, maka organisasi perlu memiliki kebijakan dan prosedur yang baik dalam penerimaan pegawai, pengembangan kompetensi karyawan, penilaian prestasi dan pemberian kompensasi atas prestasi mereka.

8) Pengaruh ekstern

Pengaruh ekstern adalah pengaruh yang ditetapkan dan dilakukan oleh pihak luar suatu organisasi yang mempengaruhi suatu operasi dan praktek organisasi. Hal ini meliputi pemantauan dan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan badan legislative dan instansi yang mengatur. Pengaruh ekstern biasanya merupakan wewenang di luar perusahaan. Pengaruh ini dapat meningkatkan kesadaran dan sikap manajemen terhadap perilaku dan pelaporan operasi perusahaan, serta dapat juga mendesak manajemen untuk meneapkan kebijakan dan prosedur pengendalian intern.

b. Penilaian Risiko

Perusahaan harus menyadari dan menghadapi risiko. Perusahaan harus menetapkan tujuannya dipadukan dengan kegiatan keuangan serta kegiatan lainnya agar dapat beroperasi secara terkoordinasi. Perusahaan juga harus membuat mekanisme untuk mengidentifikasi, menganalisis dan mengelola risiko terkait.

c. Aktivitas Pengendalian

Kebijakan pengendalian dan prosedur harus ditetapkan dan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diidentifikasi manajemen untuk menghadapi risiko, yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan, dilaksanakan secara efektif. Aktifitas pengendalian merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas dan keamanan terhadap asset perusahaan.

d. Informasi dan Komunikasi

Merupakan sistem informasi dan komunikasi yang memberikan informasi yang diperlukan kepada para pegawai, dalam melaksanakan, mengelola dan mengendalikan operasinya. Sistem informasi dan komunikasi merupakan suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, *financial*, dan ketaatan atas ketentuan dan peraturan yang berlaku.

e. Monitoring

Seluruh proses harus dipantau dan dimodifikasi sesuai kebutuhan. Dengan demikian sistem yang ada dapat secara dinamis berubah sesuai keadaan yang dihadapi. *Monitoring* merupakan proses penilaian terhadap kualitas sistem internal kontrol termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit struktur perusahaan, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal, dengan ketentuan bahwa penyimpangan yang terjadi dilaporkan kepada Direksi dan tembusannya disampaikan kepada Komite Audit.

E. Pihak yang berkepentingan dan Bertanggung Jawab Atas Pengendalian Intern

Pihak yang berkepentingan atau berkaitan dengan pengendalian intern menurut Gondodiyoto (2010:258) antara lain :

1. Manajemen Perusahaan

Pihak manajemen perusahaan atau organisasi berkepentingan terhadap system pengendalian intern, karena struktur pengendalian intern suatu perusahaan pada dasarnya adalah tanggung jawab manajemen puncak karena sistem pengendalian intern membantu manajemen puncak dalam :

- a. Menyediakan data handal untuk pengelolaan atau pengurusan perusahaan
- b. Pengamanan asset dan catatan akuntansi entitas atas perusahaan
- c. Mendorong peningkatan efisiensi operasional

- d. Mendorong ketaatan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan
 - e. Merupakan aturan umum yang harus dijalankan perusahaan
2. Dewan Komisaris, auditor intern dan sebagainya
 3. Para karyawan perusahaan itu sendiri, karena sistem pengendalian intern berfungsi sebagai:
 - a. Merupakan aturan umum yang harus dilaksanakan perusahaan
 - b. Merupakan pedoman kerja
 4. *Regulator Body* (Badan Pengatur/ pemerintah atau ikatan profesi)
 5. Auditor ekstern independen

F. Pentingnya Pengendalian Intern

Gondodiyoto (2010:248) menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat semakin pentingnya pengendalian intern sebagai berikut :

- a. Perkembangan kegiatan dan skalanya menyebabkan kompleksitas struktur, sistem dan prosedur suatu organisasi makin rumit. Untuk dapat mengawal operasi organisasi, manajemen hanya mengandalkan kepercayaan atas berbagai laporan dan analisa.
- b. Tanggung jawab utama untuk melindungi asset organisasi, mencegah dan menemukan kesalahan-kesalahan dan kecurangan-kecurangan terletak pada manajemen, sehingga manajemen harus mengatur sistem pengendalian intern yang sesuai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.
- c. Pengawasan lebih dari satu orang merupakan cara yang tepat untuk menutup kekurangan-kekurangan yang bisa terjadi pada manusia, yang termasuk karakteristik sistem pengendalian intern yang baik.
- d. Pengawasan yang langsung pada sistem pengendalian intern yang baik dianggap lebih tepat daripada pemeriksaan secara langsung dan setail oleh pemeriksa.

2.1.2 Kredit

A. Pengertian Kredit

Menurut Sinungan (2011:17), kredit adalah pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lain dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai kontra prestasi berupa pendapatan bunga.” Sedangkan, pengertian kredit menurut Kasmir (2011:102), “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

Pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Contoh berbentuk tagihan (kredit barang), misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian kendaraan. Kredit ini berarti debitur tidak memperoleh uang tapi kendaraan, karena bank langsung membayar ke *dealer* dan debitur hanya membayar cicilan kendaraan tersebut setiap bulan. Kemudian adanya kesepakatan antara bank dengan debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.

B. Unsur-unsur Kredit

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit menurut Kasmir (2011:104) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani diberikan. Oleh sebab itu sebelum kredit diberikan terlebih dahulu dilakukan analisis terhadap permohonan kredit dari nasabah. Menurut Suyatno (2007:16), Kepercayaan yaitu keyakinan dari si peminjam kredit bahwa

prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang, jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya didalam kredit juga terdapat unsur kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (dibawah satu tahun), jangka menengah (satu sampai tiga tahun) dan jangka panjang (diatas tiga tahun). Menurut Suyatno (2007:16), Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini, terkandung pengertian nilai agio dari uang yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.

4. Resiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagih. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar pula resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik yang disengaja oleh nasabah maupun yang tidak disengaja. Menurut Suyatno (2007:16), *Degree of Risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memindahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi tingkat resikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah timbulnya jaminan dalam pemberian kredit.

5. Balas Jasa

Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan yang diperoleh dari pemberian kredit. Menurut Suyatno (2007:16), Prestasi yaitu objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun kehidupan modern sekarang ini didasarkan kepada transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang kita jumpai dalam praktek perkreditan.

C. Tujuan dan Fungsi Kredit

Kasmir (2010:95) mengatakan bahwa “Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu.” Adapun tujuan utama dari suatu kredit adalah:

1. Mencari keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank (dalam hal ini koperasi) dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada peminjam.

2. Membantu usaha peminjam

Yaitu untuk membantu usaha peminjam yang memerlukan dana, agar dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik karena akan meningkatkan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa negara.

D. Prinsip Pengkreditan

Prinsip pengkreditan berdasarkan Sinungan (2011:17) dijelaskan sebagai berikut:

1. Prinsip Kepercayaan, kepercayaan dari kreditur pada debitur akan bermanfaat dalam pengendalian kredit.
2. Prinsip Kehati-hatian merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi kredit macet.

3. Prinsip 5 C

- a. *Character*, menunjukkan kemungkinan atau profitabilitas dari debitur untuk secara jujur berusaha memenuhi kewajibannya. Faktor ini sangat penting, karena setiap transaksi kredit mengandung kesanggupan untuk membayar. Menurut Kasmir (2012:95), “*Character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini adalah calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank, bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.”
- b. *Capacity*, adalah pendapat subjek mengenai kemampuan dari debitur, ini diukur dengan *record* di waktu lalu, dilengkapi dengan observasi fisik pada pabrik atau toko dari debitur. Menurut Kasmir (2012:95), “*Capacity (capability)*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba.”
- c. *Capital* diukur oleh posisi *financial* secara umum dimana hal ini ditunjukkan oleh analisa *ratio financial*, yang khususnya ditekankan pada “*tangible net worth*” dari perusahaan. Menurut Kasmir (2012:95), “*Capital*, dimana untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh Bank.”
- d. *Collateral* dicerminkan oleh aktiva dari debitur yang diikatkan, atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada debitur tersebut. Menurut Kasmir (2012:95), “*Collateral* merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah bank yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan”
- e. *Condition*, menunjukkan *impact* (pengaruh langsung) dari trend ekonomi pada umumnya terhadap perusahaan yang bersangkutan atau perkembangan khusus dalam suatu bidang ekonomi tertentu yang mungkin mempunyai efek terhadap kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya. Menurut Kasmir (2012:95), “*Condition*, dalam menilai

kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.”

4. Prinsip 5P

- a. *Party* (para pihak). Bertujuan mengklasifikasi calon debitur berdasarkan modal, loyalitas, dan karakternya. Pengklasifikasian ini akan menentukan perlakuan bank dalam hal pemberian fasilitas. Menurut Kasmir (2012: 96), “*Party* yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.”
- b. *Purpose* (tujuan) mencari data tentang tujuan atau keperluan penggunaan kredit. Apakah akan digunakannya untuk berdagang, atau untuk membeli rumah atau untuk bertujuan lainnya. Selain itu, apakah tujuan penggunaan kredit itu sesuai dengan *line of business* kredit yang bersangkutan. Misalnya, ujuan atau keperluan kredit untuk perkapalan sedangkan *line of business* bank dalam pertanian. Menurut Kasmir (2012:96), “*Purpose* yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif, dan lain sebagainya.”
- c. *Payment* (pembayaran), mengetahui bagaimana perkiraan pembayaran kembali peminjaman yang akan diberikan. Hal ini dapat diperoleh dari perhitungan tentang prospek, kelancaran penjualan dan pendapatan sehingga dapat diperkirakan kemampuan pengembalian pinjaman ditinjau dari waktu serta jumlah pengambilannya. Menurut Kasmir (2012:96), “*Payment* merupakan ukuran nasabah bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.”

- d. *Profitability* (perolehan laba), menilai berapa tingkat keuntungan yang akan diraih calon debitur, bagaimana polanya, apakah makin lama makin besar atau sebaliknya. Menurut Kasmir (2012:96), “*Profitability* untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari period eke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.”
- e. *Protection* (perlindungan), menilai bagaimana calon debitur melindungi usaha dan mendapatkan perlindungan usaha. Apakah dalam bentuk jaminan barang, orang atau asuransi. Menurut Kasmir (2012:96), “*Protection* tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau jaminan asuransi.”

2.1.3 Pengendalian Internal Kredit

Pada umumnya pengendalian internal kredit meliputi unsur-unsur pengendalian internal berupa penelaah dan penekanan pada tujuan pengendalian yang ingin dicapai perusahaan. Menurut La Midjan (2001:355) memuat prinsip-prinsip berikut :

- a. Perlunya adanya pemisahan fungsi antara :
 - 1. Fungsi pembahasan kredit pada bagian analisa kredit
 - 2. Fungsi realisasi kredit pada bagian penyelenggara kredit atau administrasi kredit
 - 3. Fungsi pengawasan kredit berada pada bagian pengawasan kredit
- b. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana dengan kredit
- c. Perlu penyusun ikhtisar mutasi keuangan bulanan
- d. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administratif

- e. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin keamanan atas kelayakan, baik bersifat preventif maupun represif
- f. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat
- g. Perlu disusun pencatatan dan pengarsipan surat-surat dan berkas pemberian kredit berikut rekening giro, kredit, dan lain-lain secara baik

Tujuan pengendalian intern kredit menurut Mulyono (2001: 463) adalah sebagai berikut :

- a. Agar penjagaan atau pengawasan dalam pengelolaan kekayaan bank dibidang perkreditan dapat dilakukan dengan baik untuk menghindari penyelewengan-penyelewengan baik dari pihak ekstern bank maupun intern bank
- b. Untuk memastikan ketelitian dan kebenaran data akuntansi di bidang perkreditan
- c. Untuk meningkatkan efisiensi di dalam pengelolaan dan tata laksana saha di bidang perkreditan dan mendorong tercapainya rencana yang ada

Tujuan pengendalian internal kredit di atas ketiganya saling berkaitan. Seperti adanya administrasi kredit yang dilaksanakan secara teliti dan benar akan membantu dan mempermudah menemukan penyelewengan-penyelewengan yang terjadi. Adanya dokumentasi yang baik terhadap arsip-arsip perkreditan akan memajukan efisiensi pengelolaan di bidang perkreditan.

Beberapa indikator pengendalian internal pemberian kredit yang efektif yang merupakan tujuan dari pengendalian internal pemberi kredit, yaitu meliputi adanya :

- a. Pemberian kredit sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan dan prosedur-prosedur serta ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank
- b. Adanya keamanan kredit
- c. Adanya keuntungan bank dalam bentuk bunga
- d. Penggunaan kredit sesuai dengan rencana yang telah diajukan
- e. Pemberian kredit yang selektif berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank

- f. Tingkat kolektibilitas yang tinggi
- g. Pengembalian kredit sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan

2.1.4 Kriteria UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menyatakan bahwa kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut :

A. Pengertian UMKM

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

B. Kriteria UMKM

- a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - 1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk rumah dan bangunan tempat usaha, atau

- 2) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- b. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk rumah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- c. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- 1) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk rumah dan bangunan tempat usaha, atau
 - 2) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah)

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini antara, yaitu ; Ayu dan Nyoman (2013), rancangan penelitiannya adalah deskriptif dengan data kualitatif yang diperoleh dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Analisis yang dilakukan yaitu dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR. Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu: jaminan hilang, *bad character*, bercerai, bangkrut, salah analisa kredit. Upaya yang telah dilakukan yaitu: tagih terus, *addendum*, *restructure*, *recondition*, *rescedulle*.

Artining dan Adi (2014), analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dengan melakukan evaluasi terhadap unsur-unsur sistem pengendalian intern dan melakukan pengujian efektivitas dengan menggunakan *attribute sampling*,

model *stop-or-go sampling*. Teknik pemilihan sampel dilakukan dengan metode pengambilan sampel *simple random sampling*. Dengan jumlah kuesioner sebanyak 7 responden. Hasil pengujian menunjukkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan *attribute sampling*, metode *stop-or-go sampling* menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif.

Amirah (2013), data penelitian diperoleh dari kuesioner dan beberapa observasi serta wawancara langsung dengan pihak yang terkait, dan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif (analisis deskriptif). Prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik. Namun, PT. Bank Mega Cabang Makassar sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku.

Weni (2012), metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan regresi dan korelasi. Hasil penelitian pada PT. BPR Universal Mandiri Puncak menunjukkan hubungan antara pengendalian internal dan kolektabilitas kredit sebesar 0,9176 atau 91.76% yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang kuat dan positif antara pengendalian internal dengan kolektabilitas kredit. Sementara pengaruh variable x dan variable y sebesar 0,8281 atau 82,81% dengan persamaan regresi yang terbentuk $Y = 0,675 + 0,85X$ dan setelah dilakukan pengujian hipotesis ternyata keduanya berpengaruh signifikan.

Putu dan Ketut (2013), metode yang digunakan adalah metode sampling jenuh dan jumlah responden sebanyak 37 orang dengan sampel 7 BPR. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian mengemukakan bahwa struktur pengendalian internal kredit berpengaruh negatif

dan signifikan pada kredit bermasalah BPR di Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk jenis-jenis, prosedur umum pengendalian internal dan kolektibilitas kredit tidak berpengaruh signifikan.

Tabel 2.1 Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti (Tahun)	Variabel Penelitian	Metode Analisis Data	Hasil
Ayu dan Nyoman (2014)	1. Pengendalian internal 2. Pemberian kredit	Metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan pengendalian internal dalam pemberian kredit pada PT. BPR. Kanaya telah memadai. Kendala yang dialami yaitu: jaminan hilang, <i>bad character</i> , bercerai, bangkrut, salah analisa kredit. Upaya yang telah dilakukan yaitu: tagih terus, <i>addendum</i> , <i>restructure</i> , <i>recondition</i> , <i>rescedulle</i> .
Artining dan Adi (2014)	1. Evaluasi 2. Sistem Pengendalian Intern 3. Kredit	Metode deskriptif Kualitatif dan deskriptif kuantitatif	Hasil pengujian menunjukkan unsur-unsur sistem pengendalian intern pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt menunjukkan bahwa sistem pengendalian internnya baik dan dikategorikan memadai. Pengujian kepatuhan dengan menggunakan <i>attribute sampling</i> , metode <i>stop-or-go sampling</i> menunjukkan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Kantor Cabang Seririt dikatakan efektif.
Amirah (2013)	1. sistem pengendalian intern 2. pemberian kredit	Metode kuantitatif dan kualitatif	Prosedur pemberian kredit serta sistem pengendalian internal pemberian kredit yang dilaksanakan PT. Bank Mega Cabang Makassar jelas dan sangat baik. Namun, PT. Bank Mega Cabang Makassar sebaiknya menetapkan sebuah mekanisme khusus untuk mengetahui dan menelusuri ketidakwajaran yang terjadi dengan nasabah atau debitur maupun pihak luar lainnya baik dalam hal operasional, keuangan maupun ketaatan terhadap kebijakan yang berlaku.
Weni (2012)	1. Pengendalian internal 2. Kolektibilitas kredit	Metode analisis deskriptif kuantitatif (regresi dan kolerasi)	Hasil penelitian pada PT. BPR Universal Mandiri Puncak menunjukkan hubungan antara pengendalian internal dan kolektabilitas kredit sebesar 0,9176 atau 91.76% yang menunjukkan adanya hubunga yang kuat dan positif antara pengendalian internal dengan kolektabilitas kredit. Sementara pengaruh variable x dan variable y sebesar 0,8281 atau 82,81% dengan persamaan regresi yang terbentuk $Y = 0,675 + 0,85X$ dan

				setelah dilakukan pengujian hipotesis ternyata keduanya berpengaruh signifikan.
Putu dan Ketut (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis pengendalian internal 2. Prosedur umum 3. Struktur pengendalian internal 4. Kolektibilitas 5. Kredit bermasalah 	Metode analisis deskriptif kuantitatif (regresi linear berganda)		Hasil penelitian mengemukakan bahwa struktur pengendalian internal kredit berpengaruh negatif dan signifikan pada kredit bermasalah BPR di Kabupaten Buleleng, sedangkan untuk jenis-jenis, prosedur umum pengendalian internal dan kolektibilitas kredit tidak berpengaruh signifikan.

Sumber : Data diolah dari berbagai referensi, 2015

BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jember yang beralamatkan Jalan Dharmawangsa Ruko Graha Wijaya Kav. No. 14 Jember. Bank ini merupakan cabang dari Bank UMKM Jawa Timur dengan kantor pusat di Surabaya. Alasan pemilihan Bank UMKM ini untuk menjadi objek penelitian karena merupakan salah satu Bank yang berfokus pada pendanaan UMKM, selain itu juga sebagai Bank Pelaksana yang direkomendasikan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM Jember sebagai pelaksana pemberi kredit UMKM.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Erlina (2007:64), “Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh dari peneliti dari subjek beberapa individu, organisasional, industri, atau perspektif lain”. Paradigma kualitatif merupakan paradigma penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau *natural setting* yang holistik, kompleks dan rinci. (Indriantoro dan Supomo, 2011;12). Pendapat lain mengatakan bahwa, penelitian deskriptif merupakan “penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan” Hartati (2009:32). Jadi tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta- fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti pada penelitian deskriptif tidak perlu mencari

atau menerangkan sifat keterkaitan atau perbandingan, sehingga tidak memerlukan hipotesis.

3.3 Data dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara), dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi, dalam hal ini keterangan- keterangan dari pihak pelaksana pemberian kredit mengenai prosedur dan pengendalian intern dana di Bank. Data primer diperoleh secara langsung dari sumber berupa hasil wawancara dengan karyawan yang berhubungan dengan prosedur Pemberian Kredit.

b. Data Sekunder

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder dapat berupa bukti, dokumen, catatan atau laporan historis baik yang dipublikasikan atau yang tidak dipublikasikan, buku-buku teks literatur mengenai sistem pengendalian intern suatu instansi.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Survey pendahuluan

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya perlu dilakukan survey pendahuluan. Untuk dapat melaksanakan hal tersebut maka diperlukan data dari instansi. Data yang diperlukan dalam survey pendahuluan ini adalah sebagai berikut:

1) Profil Instansi

a) Sejarah pendirian instansi terkait (Bank UMKM cabang Jember)

- b) Struktur organisasi
- c) *Job description* masing-masing bagian.

2) Prosedur kredit

- a) Prosedur pemberian kredit yang diterapkan
- b) Program kredit yang diberikan

Survey pendahuluan dilakukan dengan cara mendatangi instansi yang merupakan obyek dari penelitian dengan tujuan:

- 1) Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran umum instansi yang bersangkutan.
- 2) Untuk mengetahui permasalahan yang ada di instansi yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini.

b. Survey lapangan

Untuk secara langsung mendapatkan data yang berhubungan dengan sistem pengendalian intern dari sistem pemberian kredit UMKM. Teknik-teknik yang digunakan adalah:

1) Wawancara

Pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung tentang sistem atau prosedur pemberian kredit UMKM beserta pengendaliannya terhadap seluruh bagian yang terkait diantaranya adalah Pimpinan Cabang Bank UMKM Jember, Penanggung Jawab Kasi Dana beserta *Teller*, Penanggung Jawab Kasi Kredit beserta staff, serta Kasi Umum dan Akuntansi. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah lembaga telah menerapkan pengendalian intern dari segi praktik yang sehat terkait dengan sistem pemberian kredit UMKM.

2) Observasi

Melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Maksudnya adalah untuk mengetahui secara pasti keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti.

3) Dokumentasi

Melakukan pengamatan langsung dengan memeriksa atau melihat pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan sistem pemberian kredit UMKM.

3.5 Metode Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Validitas dan realibilitas data perlu diuji melalui teknik keabsahan data atau teknik menguji dan memastikan temuan.

Penelitian ini menggunakan teknik menguji dan memastikan data melalui memeriksa kerepresentatifan yakni aspek pilihan informan yang mewakili masalah yang diteliti, memeriksa pengaruh peneliti, memberi bobot pada bukti, membuat perbandingan atau pertentangan, memeriksa makna segala sesuatu yang di luar, membuat replika temuan, mencari penjelasan tandingan, serta teknik terakhir adalah mendapatkan umpan balik dari informan beserta key informan.

Teknik umum pengujian keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Menurut Sugiyono (2014;125) terdapat tiga triangulasi:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang di kumpulkan dengan tektik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu analisis deskriptif yang didasarkan pada penggambaran yang mendukung analisa tersebut, analisa ini menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci yang sifatnya menjelaskan secara uraian dalam bentuk kalimat. Langkah-langkah yang peneliti lakukan untuk menganalisis penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian intern.

Pengumpulan data ini bersumber dari berbagai referensi yang ada baik dari buku, halaman web ataupun dari penelitian-penelitian yang telah membahas tentang pengendalian intern sebelumnya.

b. Mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dengan cara observasi dan wawancara langsung yang terkait dengan penelitian, yaitu:

- 1) Mengevaluasi struktur organisasi.
- 2) Mengevaluasi sistem otorisasi dan prosedur pencatatan.
- 3) Mengevaluasi kualitas karyawan yang sesuai dengan bidangnya.
- 4) Mengevaluasi praktik kerja karyawan.

c. Membandingkan sistem pengendalian yang diterapkan dengan teori yang terdapat dalam referensi sesuai kerangka komponen unsur pengendalian inter menurut COSO kemudian merancang ICQ (*internal control quetionaire*) yang

berhubungan dengan pemberian kredit. Evaluasi pengendalian internal yang dilakukan sesuai konsep COSO meliputi:

- 1) Lingkungan pengendalian
- 2) Penilaian risiko
- 3) Aktivitas pengendalian
- 4) Informasi dan komunikasi
- 5) Pemantauan

d. Menarik hasil dan kesimpulan.

e. Merekomendasikan sistem pengendalian intern yang sesuai dengan kondisi di Bank UMKM Jawa Timur Cabang Jember.